

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANAK AGUNG MIRAH TERISNAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 885045

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	750.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/132 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	161.750.000
1. MOTOR, YAMAHA 5 TL(MIO/A1 115S)118 CC Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA B401RA-GQZFJ (CALYA 1.2 G A/T) Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
3. MOTOR, HONDA NC110A10A1CA/T (SEPEDA MOTOR/ 110 CC) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
4. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T(SEPEDA MOTOR/ 108 CC) Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
5. MOTOR, HONDA HONDA /H1B02N42L0A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
6. MOTOR, HONDA H1B02NA1L1A/T Tahun 2025, HIBAH TANPA AKTA Rp. 18.750.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.872.739
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	943.622.739



III. HUTANG

Rp. 171.224.062

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 772.398.677

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.